

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Cahyo, Bambang Tri. *Ekonomi Pertanahan*. (Yogyakarta: Liberty, 1983).
- Effendi, Bachtiar. *Kumpulan Tulisan tentang Hukum Tanah*, (Bandung: Alumni, 1993).
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Plajar, 2010).
- Gunanegara, *Rakyat & Negara, Dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*, (Jakarta: PT Tatanusa, 2008).
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional*. Edisi Revisi. (Jakarta: Djambatan, 2005).
- \_\_\_\_\_. *Beberapa Analisa tentang Hukum Agraria*, Bagian 3, (Jakarta: "Esa" Study Club, 1980).
- Hutagalung, Arie S. *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, (Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2005).
- Limbong, Benhard. *Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Regulasi Kompensasi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2011).
- Lubis, Muhammad Yamin dan Abdul Rahim Lubis, *Pencabutan Hak, Pembebasan dan Pengadaan Tanah*, (Bandung: Mandar Maju, 2011).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Revisi Ketiga. (Yogyakarta: Liberty, 2007).
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009).
- Nazir, Moch. *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).
- Parlindungan III, AP. *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, (Bandung: Mandar Maju, 1993).

- Salindeho, John. *Masalah Tanah dalam Pembangunan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1988).
- Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Bina Cipta, 1987).
- Sitorus, Oloan dan Dayat Limbong, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, (Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2004).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986).
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995).
- Sugiharto, Umar Said. *Hukum Pengadaan Tanah: Pengadaan Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Umum Pra dan Pasca Reformasi*, (Malang: Setara Press, 2015).
- Sumardjono, Maria S. W. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Cetakan ke-2. (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009).
- \_\_\_\_\_. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001).
- Sutedi, Adrian. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- \_\_\_\_\_. *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

- Indonesia. *Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum*.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah*.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. (Lembaran

*Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6217).*

\_\_\_\_\_. *Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Puntuk Kepentingan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55).*

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280).*

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada Diatasnya.*

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.*

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).*

### **C. Artikel**

Anonim, “2015-2018, Jalan Tol Baru Bertambah 442 Km”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/11/27/2015-2018-jalan-tol-baru-bertambah-442-km>, 18 Februari 2019.

\_\_\_\_\_, "Bagaimana Progres Pembangunan Infrastruktur di Indonesia", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/06/09/bagaimana-progres-pembangunan-infrastruktur>, 18 Februari 2019.

Ghozali Mukti. “Pembebasan Lahan untuk Ruas Jalan Tol Serpong-Cinere”, <https://www.kompasiana.com/detaktangsel/552a3b746ea8349a51552d20/pembebasan-lahan-untuk-ruas-tol-serpong-cinere>, 20 April 2019.

Harsono, Boedi. “Aspek Yuridis Penyediaan Tanah”. *Majalah Hukum dan Pembangunan*. Edisi No. 2 Tahun XX. (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, April 1990).

Koeswahyono, Imam. “Melacak Dasar Konstitusional Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Bagi Umum”. Makalah. 2008.